

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL PENGUPAHAN BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU



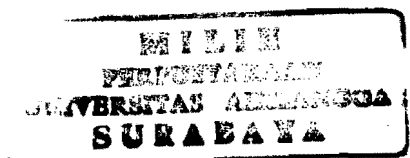
Per 112 /05
Man
P

Diajukan Oleh :

H. MOH. HIDAYAT MANGANTJO
NIM. 039910491 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL PENGUPAHAN BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

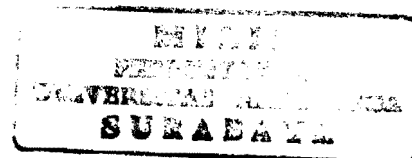


H. Machsoen Ali, SH,M.S.
NIP. 130 355 366



Moh. Hidayat Mangantjo
NIM.039910491/ U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan tentang pelaksanaan ketentuan upah minimum yang dilakukan oleh pengusaha sering terjadi dengan berbagai macam alasan, dan alasan yang sering dipergunakan oleh pengusaha/ perusahaan pada umumnya alasan ekonomi. Dengan adanya penyimpangan atau pelanggaran mengenai ketentuan pelaksanaan upah minimum tersebut pemerintah sudah menjalankan fungsinya lewat pegawai pengawas, dan pengawasan yang merupakan wewenang daripada pegawai pengawas sudah dijalankan. Dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya penyimpangan atau pelanggaran tentang ketentuan pelaksanaan upah minimum pemerintah sudah memfasilitasinya, yaitu mekanisme pengajuan sengketa perselisihan perburuhan lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- b. Perlindungan hukum mengenai pelaksanaan ketentuan upah minimum sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upah minimum, baik berbentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Undang-Undang dan Keputusan Gubernur serta peraturan yang lainnya. Dengan demikian sangat jelas sekali peran serta atau kepedulian daripada pemerintah di dalam masalah perburuhan yang

berkaitan dengan upah sudah diantisipasi lewat peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga diharapkan bisa dipakai sebagai payung hukum baik oleh pengusaha maupun pekerja, dengan tujuan agar terjalin suatu hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

2. SARAN

- a. Didalam meningkatkan taraf ekonomi dengan tujuan agar masyarakat bisa hidup sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin, terutama kaum buruh, seyogyanya pemerintah dengan komponen yang ada yaitu pegawai pengawas melakukan pengawasan di perusahaan secara berkala atau periodik, terutama yang berkaitan dengan masalah pengupahan. Dengan adanya pengawasan secara berkala atau periodik tersebut diharapkan nantinya masing-masing pihak, yaitu pengusaha dan pekerja selalu konsekuen di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, terutama menyangkut masalah pengupahan. Dengan demikian pada akhirnya keinginan pemerintah untuk membangun masyarakat di bidang ekonomi akan terwujud dengan baik.
- b. Agar buruh mengerti tentang hak dan kewajibannya, maka pemerintah lewat pegawai pengawas atau pihak-pihak yang menangani masalah perburuhan perlu menambah tugas baru dalam bidang perburuhan, yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada pengusaha atau pekerja, agar mereka memahami dan menyadari serta menjalankan hak dan kewajibannya tanpa tekanan dan mereka merasa dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.